



RENCANA KERJA

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI SUMATERA SELATAN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Rencana Kerja (Renja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026** dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara terencana, terukur, dan akuntabel. Renja 2026 disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Kerja ini berfokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami menyadari bahwa pengadaan yang efektif merupakan kunci utama dalam mendukung keberhasilan program-program pembangunan di Sumatera Selatan. Oleh karena itu, Renja 2026 menggarisbawahi beberapa prioritas strategis, termasuk pengembangan sistem pengadaan berbasis digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan internal. Kami berharap langkah-langkah ini dapat meminimalisir risiko, mencegah praktik korupsi, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masukan, saran, dan kerja sama yang konstruktif sangat membantu kami dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait. Dengan semangat kebersamaan dan integritas, kami optimis dapat mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik demi terwujudnya Sumatera Selatan yang lebih maju dan sejahtera.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan Buku Rancangan Akhir Renja ini, kami harapkan saran perbaikan untuk penyempurnaan dan semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan.

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA,

MUZAKKIR, ST, MT
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196709291998031005

AFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	12
2.3. Laporan Kinerja	19
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN.....	 24
3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	24
3.2 Indikator Kinerja dan Program Kegiatan.....	25
3.3 Uraian Tugas dan Fungsi.....	28
3.4 Struktur Organisasi.....	29
3.5 Isu Strategis.....	33
3.6 Sumber Daya Aparatur.....	34
 BAB IV PENUTUP.....	 36

AFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi dan Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026.....	14
Tabel 1.2	Indikator Kinerja Kunci Utama (IKU) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan.....	15
Tabel 2.1	Form Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan.....	20
Tabel 3.1	Target Indikator Kinerja Tahun 2025 Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan.....	25
Tabel 3.2	Program/Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.....	26
Tabel 3.3	Uraian Tugas Kepala Bagian dan Sub Bagian Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan	29
Tabel 3.4	Data Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan.	34

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi
- Gambar 2 Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi Sumatera Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

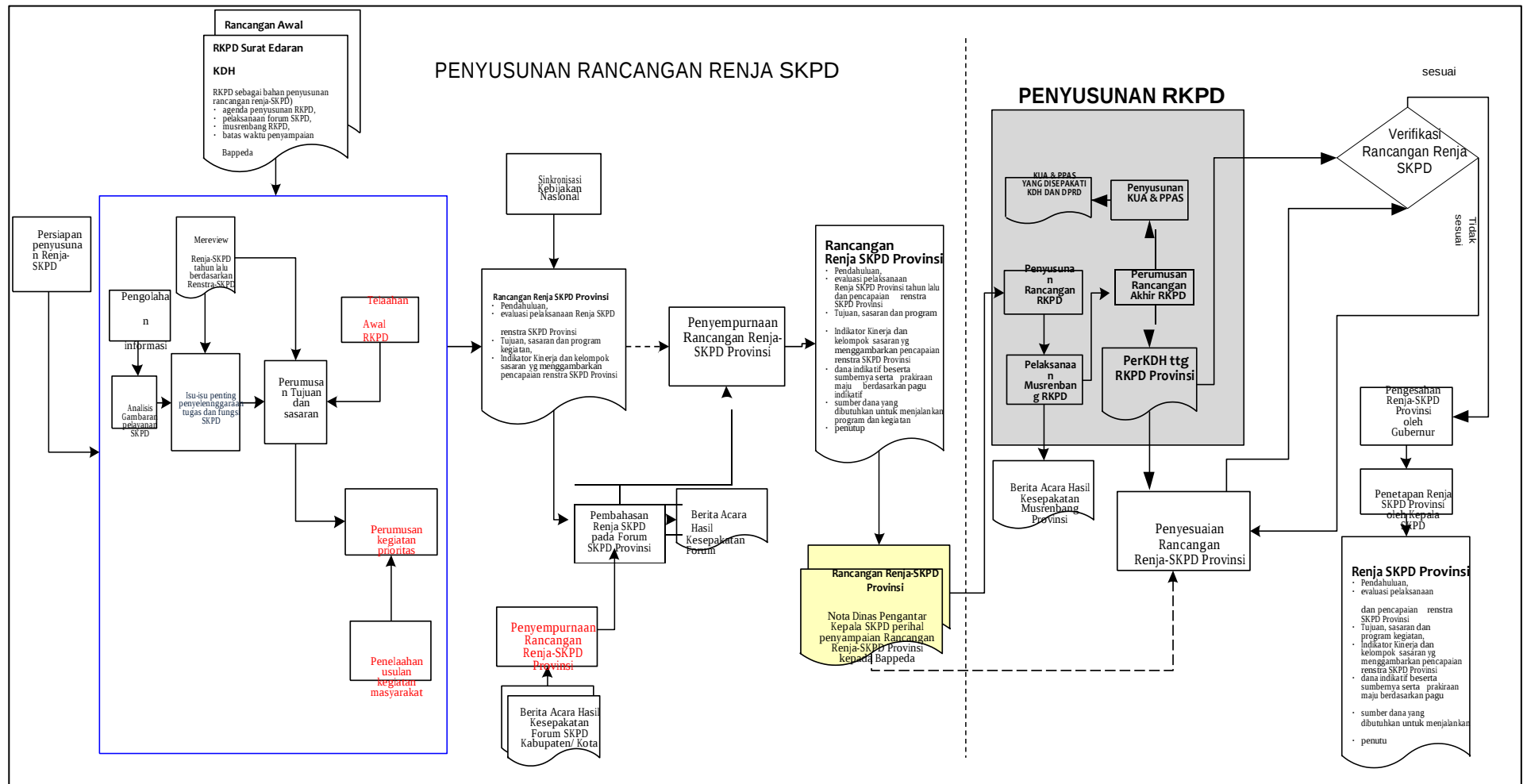
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini merupakan Rencana Kerja (Renja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, yang disusun berpedoman kepada Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD wajib membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan bagian dari tahapan sistem penganggaran.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyusunan Rancangan Renja Tahun 2025 yang pada akhirnya nanti digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).

Adapun tahapan dalam penyusunan Renja SKPD pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi



1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024);
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
- 16) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 45);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja ini adalah untuk merumuskan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai Dokumen turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah agar dapat menjamin keterkaitan, keserasian dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagai berikut :

- 1) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 2) Menyediakan acuan bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025 secara terpadu, terarah dan terukur;
- 3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2026;

- 4) Mewujudkan rencana tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja SKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 memuat beberapa bab pokok yaitu :

- BAB I** Memuat hal-hal umum tentang pelaksanaan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
- BAB II** Memuat evaluasi capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan.
- BAB III** Memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilakukan 1 (satu) tahun anggaran.
- BAB IV** Penutup yang memuat catatan-catatan dan tindak lanjut hasil analisis kebutuhan Program dan Kegiatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada Tahun Anggaran 2024 Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.794.400.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

2.1.1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1.1.1.1 *Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*

2.1.1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.1.1.2.1 *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

2.1.1.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.1.1.3.1 *Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

2.1.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.1.1.4.1 *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

2.1.2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

2.1.2.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.2.1.1 *Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.1.2 *Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.2.1.3 *Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*

- 2.1.2.2. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- 2.1.2.2.1 *Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik*
- 2.1.2.2.2 *Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa*
- 2.1.2.2.3 *Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa*
- 2.1.2.3. Kegiatan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 2.1.2.3.1 *Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia PBJ*
- 2.1.2.3.2 *Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa*
- 2.1.2.3.3 *Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa*

2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran anggaran sebesar Rp 1.529.400.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) kegiatan, 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

2.1.1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran anggaran sebesar Rp. 250.400.000,- (dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Untuk pembayaran Honorarium KPA dan PPTK sesuai Standar Biaya Umum.

Realisasi Keuangan : Rp.188.560.000 (75,30%)

Realisasi Fisik : 100 %

2.1.1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran anggaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Untuk Biaya perjalanan dinas rutin kantor dalam daerah dan luar daerah selama Tahun 2024

Realisasi Keuangan : Rp.68.397.713 (91,20%)

Realisasi Fisik : 100%

2.1.1.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Untuk Pembelian sarana dan prasarana untuk kantor pada Biro PBJ;

Realisasi Keuangan : Rp.119.550.000 (28,46%)

Realisasi Fisik : 100%

2.1.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 784.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Tenaga Kerja Honorer 15 (lima belas) orang dan 4 (empat) orang TKPD
 - b. Belanja Jasa Kebersihan Kantor
 - c. Belanja Alat Kebersihan Kantor

Realisasi Keuangan : Rp.506.106.500 (65,65%)

Realisasi Fisik : 100%

2.1.1. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu :

2.1.2.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan analisa pasar .
- b. penyusunan kebijakan strategi pengadaan barang dan jasa.
- c. Pelaksanaan konsolidasi pengadaan

Realisasi Keuangan : Rp.157.731.670 (85,26%)

Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah); Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

Realisasi Keuangan : Rp.164.512.157 (99,70%)

Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi UKPBJ Tingkat Provinsi Tahun 2024;
- b. Pelaksanaan Katalog Lokal;
- c. Pelaksanaan Tender PBJ;

Realisasi Keuangan : Rp.761.562.243 (97,64%)

Realisasi Fisik : 100%

2.1.2.2. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Untuk pembayaran sewa Internet, *Mail Server*, sewa Rak *Colocation* selama 1 (satu) tahun.

Realisasi Keuangan : Rp.638.441.978 (88,67%)

Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Untuk pembayaran pemeliharaan *software* selama 1 (satu) tahun dan Monev LPSE;

Realisasi Keuangan : Rp.190.109.976 (97,49%)

Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah); Pengelolaan Informasi terkait pengadaan Barang dan Jasa berupa dokumentasi dan penyampaian informasi terkait pengadaan barang dan jasa berupa video, spanduk dan baleho.

Realisasi Keuangan : Rp.198.837.534,- (94,68%)

Realisasi Fisik : 100%

2.1.2.3. Kegiatan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia PBJ dengan anggaran sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia PBJ, Peningkatan Kompetensi SDM PBJ, Workshop, Ujian Sertifikasi PBJ serta biaya kontribusi Bimtek Personil Pengelola PBJ Tahun 2024.

Realisasi Keuangan : Rp.676.593.107 (93,97%)

Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); Penyusunan Tingkat Kematangan UKPBJ, Rakor Jabfung UKBPJ Kab/Kota.

Realisasi Keuangan : Rp.261.410.731,- (95,06%)
Realisasi Fisik : 100%

- Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah);

Pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan pendampingan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan UKPBJ Kab/Kota dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Pelaksanaan Bimtek Personil UKPBJ pada OPD dan Kabupaten/Kota.

Realisasi Keuangan : Rp.1.000.039.069,- (98,53%)
Realisasi Fisik : 100%

3. Realisasi Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.794.400.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Realisasi Keuangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.4.873.252.678,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah atau 84,10 % dari total anggaran.

Realisasi Fisik per 31 Desember 2024 sebesar 100 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Realisasi dan Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026

Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan pencapaian sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	71,93	72,69	68,19	-	68,44	-

2.2.1.1. Indikator Kinerja Kunci Utama (IKU) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. IKU ini harus spesifik, dapat diukur (measurable), relevan, dan dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta selaras dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra.

Tabel 1.2.
Indikator Kinerja Kunci Utama (IKU)
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)		Sumber Data
					Indikator	Perhitungan	
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	- SIRUP	Nilai RUP SIRUP dibandingkan dengan nilai belanja PBJ	Basis Data RUP
					- ePurchasing	Jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk ePurchasing (Katalog Elektronik)	Basis Data Katalog Elektronik
					-non Etendering/non ePurchasing	Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung	Basis data SPSE (transaksional & pencatatan) dan RUP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)		Sumber Data
					Indikator	Perhitungan	
					- eTendering	Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk eTendering	Basis data Realisasi dan RUP
					Toko Daring	Sudah pernah melakukan ePurchasing melalui Toko Daring	Basis data Toko Daring
					- eKontrak	Jumlah paket dicatatkan dalam e-Kontrak dibandingkan jumlah paket transaksional	Basis data SPSE
					- Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Jumlah SDM yang telah dipenuhi	https://ppsdm.lkpp.go.id/jumlah-dan-persebaran-jabfung-ppbj/pemda-untuk-Pemerintah-Daerah
					- Tingkat Kematangan UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ yang telah dipenuhi	Monitoring Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ bisa dilihat melalui https://siukpbj.lkpp.go.id/peta-kematangan

2.2.1.2. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

IKK Outcome : Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditanda tangani pada kuartal pertama
Penjelasan IKK :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pengadaan	$\frac{\text{Jumlah Kontrak infrastruktur dengan nilai yang besar yang diperlukan pembangunan dalam kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100 \%$	0 x 100 % = 0 %	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov.Sumsel
			220	

IKK Outcome : Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif
Penjelasan IKK :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pengadaan	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah seluruh pengadaan}} \times 100 \%$	$\frac{2627}{4782} \times 100 \% = 54,93 \%$	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov.Sumsel

IKK Outcome : Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Penjelasan IKK :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pengadaan	Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan Total belanja operasional dan modal Keterangan : - Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 ttg pengelolaan keuangan daerah, bahwa belanja langsung tidak dikenal lagi, sehingga dirubah menjadi belanja operasional dan belanja modal. Rumus yang digunakan adalah jumlah nilai belanja operasional dan belanja modal yang melalui pengadaan dibagi total belanja operasional dan modal di APBD provinsi - Belanja operasional adalah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan social - Angka yang diambil adalah angka realisasi	$\frac{1.050.187.965.695}{4.075.110.568.745,68} \times 100 \% = 25,77\%$	Biro Barang/Jasa Setda Prov.Sumsel

IKK Outcome : Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
Penjelasan IKK :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pengadaan	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (n) – Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (n-1) Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, x 100 %	$= \frac{1.688.868.713.436 - 1.768.298.584.812}{1.768.298.584.812} \times 100 \%$ = - 4,49 %	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov.Sumsel

2.3. Laporan Kinerja

Laporan kinerja biro pengadaan barang dan jasa mencakup tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja dan bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan, serta menunjukkan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pengembangan efektivitas proses pengadaan barang dan jasa. Laporan ini memuat analisis pengukuran kinerja dalam aspek waktu, biaya, kualitas, dan tingkat layanan pengadaan.

2.3.1. Tujuan Laporan Kinerja

Tujuan kinerja bagian pengadaan barang dan jasa adalah mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, dan biaya untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan nasional, dengan tetap menjaga efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri dan partisipasi UMKM. Kinerja juga diukur melalui ketepatan waktu, penghematan biaya, kualitas dan tingkat layanan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengadaan yang berlaku. Adapun tujuan dari disusunnya laporan kinerja antara lain sebagai berikut :

1). Akuntabilitas

Menunjukkan pertanggungjawaban Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan, khususnya terkait penggunaan anggaran.

2). Evaluasi dan Perbaikan Kinerja

Mengukur dan menganalisis kinerja pengadaan barang dan jasa berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), seperti ketepatan waktu, penghematan biaya, kualitas, dan tingkat layanan serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, mengidentifikasi masalah, dan menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan.

3). Perencanaan

Memberikan dasar untuk menetapkan target kinerja di masa depan, mengidentifikasi area perbaikan, dan mendukung penyusunan rencana strategis dan kinerja tahunan.

Tabel 2.1.
Form Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2024
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2024						Sumber Pendanaan (APBD/DA K Fisik dan Non Fisik)
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	
							(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Bidang Sekretariat Daerah									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	1.529.400.000	891.220.213	58,27	100	APBD
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	%	100	100	250.400.000	188.560.000	75,30	100	APBD
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	12	250.400.000	188.560.000	75,30	100	APBD
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	75.000.000	68.397.713	91,20	100	APBD
1.2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	75.000.000	68.397.713	91,20	100	APBD

.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2024						Sumber Pendanaan (APBD/DALAK Fisik dan Non Fisik)
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	
							(Rp)	(%)		
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	420.000.000	119.550.000	28,46	100	APBD
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang disediakan	Unit	20	20	420.000.000	119.550.000	28,46	100	APBD
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	784.000.000	514.712.500	65,65	100	APBD
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	13	13	784.000.000	514.712.500	65,65	100,00	APBD
2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	%	100	100		4.049.238.465		76,60	APBD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2024						Sumber Pendanaan (APBD/DA K Fisik dan Non Fisik)
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	
							(Rp)	(%)		
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang.Jasa	%	100	100	1.130.000.000	1.083.806.070	95,91	70,00	APBD
2.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	laporan	4	4	185.000.000	157.731.670	85,26	100,00	APBD
2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	laporan	12	12	780.000.000	761.562.243	97,64	100,00	APBD
2.1.3	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan abrang dan jasa	laporan	12	12	165.000.000	164.512.157	99,70	100,00	APBD
2.2	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	%	100	100	1.125.000.000	1.027.389.488	91,32	100,00	APBD
2.2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	laporan	4	4	720.000.000	638.441.978	88,67	100,00	APBD
2.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	laporan	4	4	210.000.000	198.837.534	94,68	100,00	APBD

2.3	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	2.010.000.000	1.938.042.907	96,42	100,00	APBD
2.3.1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	orang	45	45	720.000.000	676.593.107	93,97	100,00	APBD
2.3.2	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	dokumen	5	5	275.000.000	261.410.731	95,06	100,00	APBD
2.3.3	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknik Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	laporan	4	4	1.015.000.000	1.000.039.069	98,53	100,00	APBD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tugas pokok Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 42 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020, perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yakni membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas – tugas dimaksud, Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa ; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkaitan dengan tugasnya.

Rincian tujuan, sasaran dan analisis capaian dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1 **Tujuan** : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
- 2 **Sasaran** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang di dukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan reponsif
- 3 **Sasaran Strategis** : Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

3.2. Indikator Kinerja dan Program Kegiatan

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Target Indikator Kinerja Tahun 2026
Biro Pengadaan Barang/Jasa

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2026
1	2	3	4	7
IKU OPD				
1	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Angka	72
PENGADAAN				
2	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	100
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	56
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	27

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA				
3	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100
		Persentase Kebijakan dan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100

3.3. Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026 Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

Total Anggaran Belanja APBD Tahun 2026 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 6.767.345.204,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Program/Kegiatan APBD Biro PBJ Setda Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	APBD TA 2025	APBD TA.2026	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	BELANJA OPERASI	5.775.718.204	6.567.345.204	791.627.000
	a) Belanja Pegawai			
	b) Belanja Barang dan Jasa	5.775.718.204	6.567.345.204	791.627.000
2	BELANJA MODAL	957.000.000	200.000.000	(757.000.000)
	a) Belanja Modal Tanah			
	b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	957.000.000	200.000.000	(757.000.000)
	c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			
	e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
	f) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud			
	Total Belanja	6.732.718.204	6.767.345.204	34.627.000

RINCIAN PER BELANJA APBD TAHUN ANGGARAN 2026

BELANJA OPERASI : 6.567.345.204

- Belanja Pegawai : -

- Belanja Barang dan Jasa : 6.567.345.204

BELANJA MODAL : 200.000.000

TOTAL : 6.767.345.204

Dengan penjelasan, terdiri dari 2 Program, 8 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

A. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sebesar Rp. 251.000.000,-
Untuk pembayaran Honorarium KPA dan PPTK sesuai Standar Biaya Umum

B. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 75.000.000,-
Untuk pembayaran Diklat PIM II, III dan IV Tahun 2026

C. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 20.000.000,-
Biaya konsumsi Rapat Rutin pada Biro PBJ selama Tahun 2026
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 60.000.000,-
Biaya perjalanan dinas rutin kantor dalam daerah dan luar daerah selama Tahun 2026

D. KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp 200.000.000,-
Pembelian sarana dan prasarana untuk kantor pada Biro Pengadaan Barang/Jasa

E. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- 6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp 170.000.000,-
 - d. Belanja Jasa Tenaga Kerja PPPK Paruh Waktu selama 13 bulan
 - e. Belanja Jasa Kebersihan Kantor

II. PROGRAM KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 7. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 300.000.000,-
 - d. Melakukan analisa pasar .
 - e. penyusunan kebijakan strategi pengadaan barang dan jasa.
 - f. Pelaksanaan konsolidasi pengadaan
- 8. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 300.000.000,-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- 9. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 1.500.000.000,-
 - d. Pengelolaan Katalog
 - e. Pelaksanaan Tender dan seleksi PBJ

B. KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- 10. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebesar Rp 700.000.000,-
Pembayaran Sewa Internet dan sewa Rak Collocation selama 1 tahun.
- 11. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 400.000.000,-
Pembayaran pemeliharaan software selama 1 tahun dan Monev LPSE
- 12. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 300.000.000,-
Pengelolaan Informasi terkait pengadaan Barang dan Jasa berupa dokumentasi dan penyampaian informasi terkait pengadaan barang dan jasa.

C. KEGIATAN PEMBINAAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

13. Pembinaan Sumber Daya Manusia PBJ sebesar Rp 941.345.204,-
 - a. Pengelolaan kegiatan rutin kantor
 - b. Pembinaan SDM PBJ
 - c. Peningkatan kompetensi SDM PBJ
 - d. Ujian Sertifikasi
 - e. Kontribusi Pelatihan
14. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 850.000.000,-
 - a. Rakor UKPBJ Se Provinsi Sumsel
 - b. Penyusunan Tingkat Kematangan UKPBJ
 - c. Peningkatan Nilai ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan)
15. Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 700.000.000,-
 - a. Pelaksanaan konsultasi dan pendampingan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan UKPBJ Kab/Kota dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - b. Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Sosialisasi PBJ.

Tabel 3.2.
Prakiraan Maju Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tahun 2027

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA PAGU ANGGARAN TAHUN 2027
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.970.440.289
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	257.275.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	257.275.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.165.289
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan	192.165.289

	Konsultasi SKPD	
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.200.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	900.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000
II	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.890.046.985
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.550.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	750.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	450.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.615.046.985
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.815.046.985
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	350.000.000
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	450.000.000
	Kegiatan Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.725.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	950.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	875.000.000
	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	900.000.000
	TOTAL	8.860.487.274

3.4. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :

3.4.1. Tugas Pokok

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

3.4.2. Fungsi Pokok

Dalam melaksanakan tugas pokok Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

- 1) menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 2) menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 3) menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkaitan dengan tugasnya.

3.5. Struktur Organisasi

3.5.1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :

- 1) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 2) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- 3) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 - Subbagian Tata Usaha dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

Tabel 3.3.

Uraian Tugas Kepala Bagian dan Sub Bagian pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas
1	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumsel	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;

1.1.	Kasubbag Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	a. menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa; b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa; c. menyusun strategi pengadaan barang/ jasa; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1.2.	Kasubbag Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	a. menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; b. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; c. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/ sektoral; d. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1.3.	Kasubbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	a. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; c. memberikan masukan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumsel	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi dan/ atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa serta tata usaha.
2.1.	Kasubbagian Tata Usaha dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang	a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,

	dan Jasa	penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan; serta c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/ aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan; d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro; f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LkjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro; g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro; h. melaksanakan perlengkapan biro; perencanaan pemeliharaan i. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; J. melaksanakan pembinaan pegawai ASN; k. membina bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ; l. mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang/ jasa; m. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2.2.	Kasubbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	a. mengelola dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ; b. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ; c. mengelola personil UKPBJ; d. mengembangkan sistem insentif personil UKPBJ; e. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik; f. mengelola dan mengukur kinerja pengadaan

		barang/ jasa pemerintah; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2.3.	Kasubbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	a. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa; b. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/ atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-Monev, SIKaP; c. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; d. memberikan layanan konsultasi pengadaan barang/ jasa baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota; e. memberikan layanan advokasi pengadaan barang/jasa kepada pelaku pengadaan barang/jasa; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3	Kepala Bagian Pengelolaan Layananan Secara Elektronik Provinsi Sumsel	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.
3.1.	Kasubbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara	a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya; b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

		diberikan oleh pimpinan.
3.2.	Kasubbagian Pengembangan Sistem Informasi	a. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi; b. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ; dan c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3.3.	Kasubbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	a. menyiapkan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas; b. mengelola informasi kontrak; c. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; d. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3.6. Isu Strategis

Dalam menyusun perencanaan pembangunan perlu memperhatikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Sebagai penyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang bersifat spesifik yaitu dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, isu – isu strategis berkaitan dengan dampak yang signifikan Biro Pengadaan Barang/Jasa dimasa mendatang. Berikut Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) pada lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi :

- 1) Penggunaan Produk dalam Negeri yang belum mencapai 100%;
- 2) Perlunya peningkatan belanja melalui E-Katalog Lokal;
- 3) Kurangnya SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- 4) Belum adanya Tunjangan Khusus untuk ASN UKPBJ.

3.7. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari berbagai posisi seperti pejabat struktural, pejabat fungsional PPBJ, tim teknis, tim pengelola LPSE dan staf pendukung, yang semuanya bertanggung jawab atas kegiatan pengadaan agar berjalan sesuai ketentuan.

Berikut dijabarkan data Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan :

Tabel 3.4.
Data Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa
berdasarkan jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN GOLONGAN	
Unit Kerja	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan
Keadaan	Per September 2025
JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN	
Laki-Laki	35 orang
Perempuan	29 orang

No.	Golongan/Ruang	Jumlah PNS Daerah Provinsi	Keterangan
1	IV/a	10	-
2	IV/b	4	-
3	IV/c	2	-
4	IV/d	-	-
5	IV/e	-	-
Jumlah		16	
6	III/a	18	-
7	III/b	4	-
8	III/c	6	-
9	III/d	20	-

Jumlah		48	
10	II/a	-	-
11	II/b	-	-
12	II/c	-	-
13	II/d	-	-
Jumlah		0	
14	I/a	-	-
15	I/b	-	-
16	I/c	-	-
17	I/d	-	-
Jumlah		0	
Jumlah Keseluruhan		64	

JUMLAH PNS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN		
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	
4	Sarjana Muda (SM)/D-3	1
5	Sarjana (S-1)	39
6	Pasca Sarjana (S-2)	24
7	Doktoral (S-3)	-
Jumlah		64

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 telah disusun secara komprehensif dan sistematis. Dokumen ini mencerminkan komitmen kuat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan. Dengan mengimplementasikan program dan kegiatan yang terencana, diharapkan target kinerja dapat tercapai secara optimal, mendukung pembangunan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini sangat bergantung pada koordinasi yang solid antar unit kerja, pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, dan pengawasan yang ketat. Dengan demikian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa siap menjadi garda terdepan dalam memastikan pengadaan barang dan jasa yang profesional dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam Renja (Rencana Kerja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini antara lain terkait perencanaan yang matang dan detail, analisis pasar yang akurat, ketersediaan dan kesesuaian anggaran, penguatan sumber daya manusia dan sarana prasarana, kepatuhan terhadap regulasi, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

Sebagai penutup, Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen strategis yang memuat landasan, arah, dan target capaian kinerja. Secara garis besar, rencana kerja ini menekankan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan. Implementasi program dan kegiatan yang telah disusun secara terperinci diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendukung percepatan pembangunan daerah secara signifikan. Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini tidak hanya diukur dari tercapainya target fisik, tetapi juga dari terwujudnya proses pengadaan yang transparan dan berintegritas. Oleh karena itu, sinergi dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat, didukung oleh pemanfaatan

teknologi, menjadi kunci utama untuk mencapai visi Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai lembaga yang profesional, modern, dan terpercaya.